



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Luthfi Assadad
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 250472

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/28 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/40 m2 di KAB / KOTA
BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.800.000

1. MOTOR, YAMAHA XEON 125 / BEBEK MATIC Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGON R Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 55.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
7.800.000
4. MOTOR, YAMAHA YAMAHA MIO GEAR S - 125 Tahun 2022,
HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 234.069.125

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 75.485.366

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 840.354.491

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

840.354.491

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.